

Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi III DPR Didik Mukri meminta pemerintah mencari jalan keluar terkait 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan tes wawasan kebangsaan (TWK) agar tidak diberhentikan.

"Konsekuensi alih status pegawai KPK khususnya yang berpotensi tidak lolos dan tidak memenuhi syarat teknis menjadi ASN dan ternyata masih sangat dihutuhkan, serta yang bersangkutan masih ingin mengabdikan diri di KPK, ada baiknya dikordinasikan dengan Presiden atau menteri terkait untuk mencari jalan keluarnya," kata Didik, Kamis (6/5).

Menurut Didik, hal itu mesti dilakukan guna memastikan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tetap berjalan optimal. Politik Partai Demokrat itu mencontohkan, pemerintah mengangkat guru yang tidak memenuhi syarat ikut tes CPNS dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Mungkin ada kebijakan dan jalan keluar yang lain yang lebih baik, harusnya segera dipikirkan untuk memastikan support terhadap pemberantasan korupsi di KPK tetap optimal dan maksimal," katanya.

Didik berpendapat, tes

wawasan kebangsaan memang perlu diikuti oleh segenap pegawai KPK sebagai salah satu syarat alih status pegawai menjadi ASN. Namun, ia menekankan, pelaksanaan tes harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel agar tidak memunculkan kekhawatiran bahwa tes tersebut bertujuan menyindir orang-orang tertentu di KPK.

"Selama itu dilaksanakan sepenuhnya secara terukur dan terbuka maka alih status pegawai KPK tersebut bisa memenuhi asas good governance seperti yang kita harapkan bersama," kata Didik.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 75 orang pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah mengikuti tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan itu diikuti oleh 1.351 pegawai KPK sebagai bagian dari alih status kepegawaian menjadi ASN.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa mengatakan, 75 orang itu belum diberhentikan karena KPK akan menunggu penjelasan dan tindak lanjut mengenai hasil tes dari Kementerian PAN dan RB serta BKN. "Selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kemenpan RB dan BKN RI, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS," kata Cahya dalam konferensi pers, Rabu (5/5). ■ han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



RAPAT PARIPURNA DPR

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) didampingi para Wakil Ketua Rachmat Gobel (kiri), Sufmi Dasco (bawah kedua kanan) dan Muahidin Iskandar (bawah kanan) menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5). Rapat Paripurna tersebut beragendakan pidato Ketua DPR dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 dan pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR.

Kontras Sebut Virtual Police Jadi Alat Represi Baru di Dunia Digital

Virtual police merupakan gagasan Kapolri Listyo atas respons arahan Presiden Jokowi agar polisi hati-hati terapkan UU ITE. Namun Virtual Police dinilai jadi alat represi baru di dunia digital.

JAKARTA (IM) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, virtual police (polisi virtual) yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi alat represi baru di

dunia digital. Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar mengatakan, operasi virtual police cenderung menindas dan mengutuk ekspresi warga negara. Selain itu, teguran

yang dilayangkan virtual police kebanyakan menasar pengguna media sosial yang aktif mengkritik pemerintah.

"Kapolri justru merealisasikan virtual police menjadi alat represi baru di dunia digital," kata Rivanlee, dalam keterangannya tertulis, Kamis (6/5).

Menurut Rivanlee, penindakan seharusnya dilakukan kepada pelaku kriminal di media sosial. Misalnya, penipuan online, penyebaran konten pornografi, pelecehan seksual secara daring, dan pelaku rasisme.

"Tapi kami tak melihat hal tersebut," ujarnya.

Virtual police merupakan gagasan Sigit sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo agar polisi hati-hati menerapkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Virtual police mulai beroperasi pada pertengahan Februari 2021.

Tugas virtual police merujuk pada Surat Edaran (SE) Kapolri bernomor SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan

Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Kerja virtual police yaitu memantau aktivitas di media sosial dan akan melaporkan ke atasan jika menemukan unggahan konten yang berpotensi melanggar UU ITE. Selanjutnya, unggahan konten yang diserahkan oleh petugas akan dimintakan pendapat ke para ahli, seperti ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE.

Jika ada potensi tindak pidana, unggahan konten itu akan diserahkan ke Direktur Tindak Pidana Siber atau pejabat yang ditunjuk. Setelah pejabat setuju, virtual police akan mengirimkan peringatan kepada pemilik akun. ■ han



IDN/ANTARA

PENYEKATAN LARANGAN MUDIK DIPERBATAS PROVINSI

Petugas gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub memeriksa kendaraan yang dicurigai akan pergi mudik di Pos Penyekatan larangan mudik perbatasan Provinsi Banten dengan DKI Jakarta di Pasar Jumat, Jakarta, Kamis (6/5). Pemerintah resmi memberlakukan larangan mudik Idul Fitri 1422 H dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, yang berlaku diseluruh Indonesia.

SIDANG LANJUTAN HABIB RIZIEQ

Slamet Maarif: FPI Tidak Pernah Bentuk Panitia Penjemputan HRS

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan tak ada penyambutan untuk Habib Rizieq Shihab saat tiba di Bandara Soekarno Hatta pada 10 November 2020 lalu.

Hal ini dikatakan Maarif dalam kesaksiannya dalam sidang lanjutan kasus kerumunan warga dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab (HRS) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (6/5).

Slamet menegaskan, pihak FPI saat itu tidak pernah membentuk kepanitiaan dalam kepulangan HRS. Menurutnya, kepadatan yang terjadi di Bandara disebabkan karena massa yang antusias melihat HRS dari dekat. "Saya lihat ketika Habib sampai di Bandara sendiri Subhanallah Allahu Akbar saya sampai tidak bisa jalan karena hari karena saya lihat di Bandara itu tidak cuma

kami tetapi pegawai-pegawai bandara termasuk TNI-Polri itu sangat antusias menyambut Habib," kata Slamet di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dikatakan Slamet, lantunan shalawat itu, lanjut dia, pertama kali dikumandangkan oleh petugas Bandara dan personel TNI baru diikuti massa yang datang.

"Yang memulai takbir duluan itu pegawai bandara. Bukan kami, termasuk salah satu anggota TNI yang bershalawat," ujarnya.

Selanjutnya, sambung dia, Habib Rizieq Shihab dapat keluar dari Bandara berkat bantuan TNI-Polri yang bertugas. "Di luar Bandara begitu luar biasa sampai kemudian saya keluar duluan kemudian saya bilang agar dikasih jaga jarak biar Habib bisa leluasa," katanya. ■ me

Panglima TNI: Saat Ini Waktunya untuk Evaluasi Kondisi Alutsista TNI

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto hadir dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksmadana TNI Yudo Margono, dan jajarannya petinggi TNI.

Hadi mengatakan, rapat kerja penting untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi TNI.

"Akan dibahas tiga agenda, pertama soal KRI Nanggala, kedua kondisi terkini alutsista TNI AL, dan rencana modernisasi alutsista TNI khususnya kapal selam," ujar Hadi di ruang rapat Komisi I Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/5).

Hadi mengatakan, tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan Utara Bali merupakan kehilangan bagi bangsa Indonesia. Negara bukan hanya kehilangan alutsista berupa kapal selam, tapi kehilangan 53 prajurit terbaiknya. Karena itu, pemerintah telah memberikan penghargaan dan hak-hak yang layak kepada keluarga awak kapal.

"Insiden ini jadi pelajaran berharga bagi kita semua bahwa tugas TNI mengandung resiko tinggi, di samping hadapi musuh juga harus hadapi kondisi alam yang bukan jadi ruang hidupnya sebagaimana yang dialami awak kapal selam," ungkapnya.

"Saat ini jadi waktu yang tepat untuk evaluasi tentang kondisi alutsista TNI khususnya kapal selam yang dimiliki AL. Dan langkah yang akan dilakukan untuk lanjutkan modernisasi kapal selam," kata Hadi.

Lebih lanjut Hadi mengatakan, rapat kerja ini kesempatan yang baik untuk menjelaskan insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402, kondisi Alutsista dan rencana modernisasi alat pertahanan TNI. "Tenggelamnya Nanggala saat latihan di Bali, saat itu dijadwalkan KRI Nanggala 402 akan lakukan penembakan torpedo. Latihan itu bagian dari pembinaan kesiapan operasi prajurit dan satuan. Sehingga, tepat kiranya jika KSAL yang beri penjelasan detail," tandasnya.***

Natura City
Developments

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PT NATURA CITY DEVELOPMENTS Tbk DAN ENTITAS ANAK

Sentul International Convention Center, SICC Tower, Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Sentul City, Bogor, 16810

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020				
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
ASET	31 Desember 2020	31 Desember 2019	LIABILITAS DAN EKUITAS	
ASET LANCAR			31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas dan setara kas	29.118.676.928	32.324.480.550		
Piutang usaha	95.466.796.321	124.141.035.966		
Piutang non-usaha				
Pihak ketiga	456.479.311	397.857.491		
Pihak berelasi	7.726.778.785	7.726.778.785		
Persediaan	266.602.115.487	270.683.706.987		
Uang muka	6.759.300.985	6.415.967.894		
Pajak dibayar di muka	7.466.126.374	6.947.103.506		
Dana yang dibatasi penggunaannya	46.851.236.890	58.084.210.041		
Total Aset Lancar	460.447.511.081	506.721.141.220		
ASET TIDAK LANCAR				
Tanah untuk pengembangan	456.967.527.506	406.401.280.161		
Uang muka perolehan tanah	30.322.028.553	-		
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sejumlah Rp 4.007.335.791 dan Rp 3.263.408.299, pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	4.515.404.521	5.075.294.745		
Aset keuangan tidak lancar lainnya	670.040.764	682.176.687		
Total Aset Tidak Lancar	492.475.001.344	412.158.751.593		
TOTAL ASET	952.922.512.425	918.879.892.813		
			LIABILITAS	
			31 Desember 2020	31 Desember 2019
			LIABILITAS JANGKA PENDEK	
			Utang usaha-pihak ketiga	575.431.319
			Utang non-usaha	
			Pihak ketiga	139.530.188
			Pihak berelasi	14.452.406.035
			Beban masih harus dibayar	14.184.151.451
			Utang pajak	1.742.820.144
			Uang muka pelanggan jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	20.609.560.180
			Total Liabilitas Jangka Pendek	51.703.899.317
			LIABILITAS JANGKA PANJANG	
			Uang muka pelanggan jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	24.185.245.567
			Liabilitas destinasi imbalan kerja karyawan	4.655.854.147
			Total Liabilitas Jangka Panjang	28.851.099.714
			Total Liabilitas	80.554.999.031
			EKUITAS	
			Modal dasar - 11.200.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	
			Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.402.681.845 saham pada 31 Desember 2020 dan 5.402.681.154 saham pada 31 Desember 2019	540.268.184.500
			Tambahan modal disetor	41.535.729.790
			Saldo laba	-
			Telah ditentukan penggunaannya	290.556.064.554
			Belum ditentukan penggunaannya	224.906.831.725
			Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	872.360.013.394
			Kepentingan non-pengendali	7.500.000
			Total Ekuitas	872.367.513.394
			TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	952.922.512.425

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	2020	2019	
PENDAPATAN NETO	147.796.205.929	121.816.983.447	
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(43.431.771.037)	(46.701.191.320)	
LABA (RUGI) BRUTO	104.364.434.892	75.115.792.127	
Beban penjualan	(10.695.424.749)	(12.726.577.414)	
Beban umum dan administrasi	(27.726.903.374)	(29.800.419.915)	
Beban pajak final	(3.817.818.877)	(3.108.491.632)	
Pendapatan operasi lainnya	978.025.277	608.766.125	
Beban operasi lainnya	(482.993.644)	(350.573.723)	
LABA DARI USAHA	62.819.319.525	29.738.495.568	
Pendapatan keuangan	3.064.570.560	2.177.560.679	
Beban keuangan	(71.546.565)	(60.085.014)	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	65.812.343.520	31.855.971.233	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(209.822.140)	(152.183.250)	
LABA NETO TAHUN BERJALAN	65.602.521.380	31.703.787.983	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak diakui ke dalam laporan laba rugi			
Keuntungan (kerugian) aktual dari program pensiun manfaat pasti	46.711.449	(217.011.926)	
RUGI KOMPREHENSIF LAIN	46.711.449	(217.011.926)	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	65.649.232.829	31.486.776.057	
Total laba yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	65.602.521.380	31.703.787.983	
Kepentingan non pengendali	-	-	
Total	65.602.521.380	31.703.787.983	
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	65.649.232.829	31.486.776.057	
Kepentingan non pengendali	-	-	
Total	65.649.232.829	31.486.776.057	
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR	(12,14)	(5,87)	

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	161.974.898.178	90.002.321.671	
Pembayaran kepada kontraktor dan pemasok	(126.841.467.996)	(61.613.994.221)	
Pembayaran kepada karyawan	(21.407.736.189)	(21.750.511.168)	
Penerimaan kas dari aktivitas operasi lainnya	978.025.277	608.766.125	
Pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya	(17.337.879.426)	(18.916.643.616)	
Arus kas digunakan untuk operasi	(2.434.160.156)	(11.670.061.209)	
Penerimaan dari pendapatan bunga	3.064.570.560	2.177.560.679	
Pembayaran beban bunga	(71.546.565)	(60.085.014)	
Pembayaran pajak penghasilan	(151.983.250)	(495.343.000)	
Pembayaran pajak final	(3.460.885.735)	(4.976.212.355)	
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(3.054.005.146)	(15.024.140.899)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pembelian aset tetap	(156.832.126)	(205.248.975)	
Penjualan aset tetap	4.930.000	-	
Penerimaan pinjaman kepada pihak berelasi	-	7.500.000	
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(151.902.126)	(197.748.975)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penambahan saham baru	69.100	268.115.400	
Penubuhan Waran dan Penawaran Umum Perdana	34.650	134.057.700	
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	103.750	402.173.100	
PENURUNAN DALAM KAS DAN SETARA KAS	(3.205.803.622)	(14.819.716.774)	
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	32.324.480.550	47.144.197.324	
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	29.118.676.928	32.324.480.550	

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN							
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020							
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)							
	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Saldo laba		Kepentingan non-pengendali	Total ekuitas	
			Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018	540.000.000.000	41.401.672.090	-	193.420.055.668	774.821.727.758	7.500.000	774.829.227.758
Penerbitan saham baru	268.115.400	134.057.700	-	-	402.173.100	-	402.173.100
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	31.486.776.057	31.486.776.057	-	31.486.776.057
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	540.268.115.400	41.535.729.790	-	224.906.831.725	806.710.676.915	7.500.000	806.718.176.915
Penerbitan saham baru	69.100	34.550	-	-	103.650	-	103.650
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	65.649.232.829	65.649.232.829	-	65.649.232.829
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	540.268.184.500	41.535.764.340	-	290.556.064.554	872.360.013.394	7.500.000	872.367.513.394

Catatan:
* Informasi keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanuratata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (International BDO Network Of Independent Member Firms), dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagai mana tercantum dalam laporannya No. 003152/1068/AU/103/1044-11/IV/2021 tertanggal 29 April 2021 yang tidak tercantum dalam publikasi ini.
- Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Bogor, 7 Mei 2021

PT NATURA CITY DEVELOPMENTS Tbk
DIREKSI

PENGUMUMAN
DAFTAR RENCANA PEMBAGIAN KEPADA KREDITOR
PT INTI ANUGRAH ESTETIKA (DALAM LIKUIDASI)
Sehubungan dengan rencana pembagian dalam
Likuidasi PT Inti Anugrah Estetika (Dalam Likuidasi)
maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dalam rangka pembebasan hutang
perseroan. Dengan ini diberitahukan kepada Para
Kreditor bahwa daftar rencana pembagian telah
disetujui oleh Tim Likuidator pada 3 Mei 2021
dan dapat dilihat di Kantor Tim Likuidator PT Inti
Anugrah Estetika (Dalam Likuidasi) bertempat
di Gedung Graha Anugrah Estetika, The H
Tower, 12th Floor, Unit 12-01 Jl. HR. Rasuna Said
Kno 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, 12940.
Apabila terdapat Kreditor yang keberatan terhadap
daftar rencana pembagian PT Inti Anugrah Estetika
(Dalam Likuidasi) dapat melakukan upaya hukum
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengumuman ini berlaku sebagai Pemberitahuan
bagi Para Pemegang Saham, Para Kreditor dan
Para Pihak yang berkepentingan. Demikian
Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi
ketentuan Pasal 149 Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 7 Mei 2021
Tim Likuidator PT Inti Anugrah Estetika
(Dalam Likuidasi)